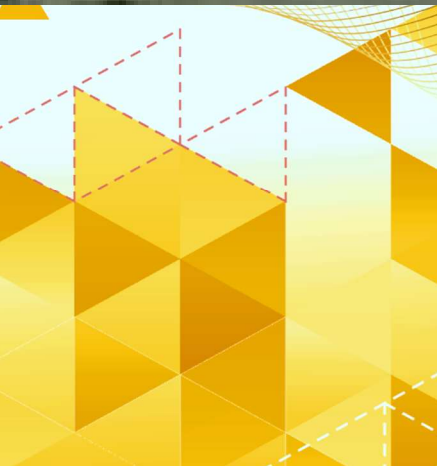
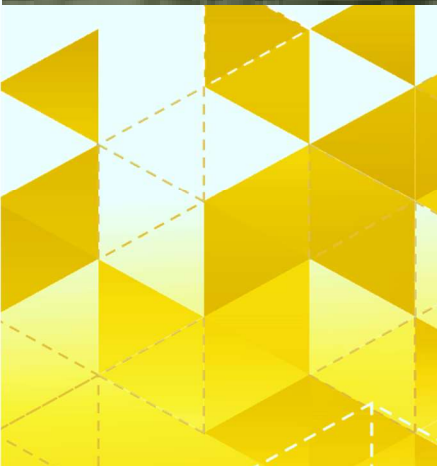


RANCANGAN RENCANA STRATEGI (RENSTRA) 2025-2029 SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SIGI

KABUPATEN SIGI



**TAHUN
2025-2029**



Kata Pengantar



VISI : KABUPATEN SIGI MAJU, BERKELANJUTAN BERBASIS PERTANIAN DAN PARIWISATA

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan KaruniaNya sehingga penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029 dapat terlaksana.

Perencanaan Strategis merupakan proses yang memperhitungkan dan mengeksplorasi berbagai faktor internal dan eksternal organisasi guna menetapkan arah pengembangan / perjalanan organisasi, tahapan serta strategi yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini berdasarkan pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran program dan kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029 serta dengan mempedomani RPJMD Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029. Dokumen ini berfungsi sebagai kerangka dan acuan kerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Sigi selama 5 (Lima) Tahun kedepan.

Renstra juga dapat menjadi pedoman khusus bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Sigi dalam menetapkan skala prioritas program/kegiatan guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas program/ kegiatan terutama di bidang Administrasi Umum Pemerintah. Rujukan bagi pemangku peran (stakeholder) untuk memberikan kontribusi dan menjadi tolak ukur pertanggungjawaban Sekretariat DPRD Kabupaten Sigi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Renstra ini juga merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran/aparatur Sekretariat DPRD Kabupaten Sigi.

Semoga dengan pendekatan Perencanaan Strategis yang jelas dan sinergis, diharapkan di masa mendatang Sekretariat DPRD Kabupaten Sigi dapat lebih maju mengantisipasi dan adaptif terhadap berbagai perubahan dan perkembangan yang sangat mempengaruhi kondisi internal maupun eksternal organisasi dalam mewujudkan visi dan misi organisasi

Sigi, 14 Agustus 2025

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN SIGI



Daftar Isi

BAB I	PENDAHULUAN
1.1	Latar Belakang
1.2	Landasan Hukum
1.3	Maksud dan Tujuan
1.4	Sistematika Penulisan
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
2.1.	Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah paling sedikit memuat:
2.2.	Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah:
BAB III	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
3.1.	Tujuan Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029;
BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ;
4.1.	Rencana Program Kegiatan dan Pendanaan;
BAB V	PENUTUP

Daftar Tabel

BAB II	2.1.2	Struktur Susunan Kepegawaian Perlengkapan Sarana Prasarana
BAB III	Tabel. 3.1	Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Sigi tahun 2025-2030
	Tabel.3.2	Penahapan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Sigi Tahun 2026-2030
	Tabel.3.3	Teknik merumuskan Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029
	Tabel.3.4	Arah Kebijakan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029
BAB IV	Tabel. 4.1	Program Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029
	Tabel.4.2	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Sigi
	Tabel. 4.3	Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Sigi Thn. 2026-2030
	Tabel. 4.4	Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Penunjang dan Pendanaan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Sigi Thn. 2026-2030
	Tabel 4.5	Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Renstra Sekretariat DPRD Kab. Sigi Tahun 2026-2030
	Tabel. 4.6	Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Mendukung Pembangunan Daerah Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029
	Tabel 4.7	Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Sigi Tahun 2025-2030
	Tabel 4.8	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029



BAB I

Pendahuluan



VISI : KABUPATEN SIGI MAJU, BERKELANJUTAN BERBASIS PERTANIAN DAN PARIWISATA

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan daerah otonom diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai tindak lanjutnya, pemerintah daerah berupaya mewujudkan kesejahteraan dimaksud melalui penyelenggaraan pembangunan daerah. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah juga harus mendukung pencapaian target pembangunan nasional dengan memperhatikan karakteristik yang dimiliki masing-masing daerah.

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Berdasarkan konsep pembangunan daerah dimaksud, daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepadanya untuk meningkatkan dan pemeratakan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

RENSTRA Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi merupakan dokumen turunan dalam rangka pencapaian RPJMD Kabupaten Sigi khusus yang terkait dengan urusan pemerintahan umum kabupaten Sigi.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas sejak tahun 1999 pemerintah sudah berusaha membangun dan menata akuntabilitas publik yaitu dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang antara lain mewajibkan instansi pemerintah sampai dengan tingkat eselon II untuk menyusun Rencana Strategik. Selanjutnya penataan akuntabilitas lebih diperkuat lagi dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Sistematika Penyusunan Rencana Strategis SKPD. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut, pemerintah daerah (termasuk di dalamnya OPD di lingkungan Pemerintah Daerah) diamanatkan menyusun rencana pembangunan daerah yang sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan. Perencanaan daerah dimaksud mencakup perencanaan daerah jangka panjang, jangka menengah dan tahunan. Perencanaan daerah jangka panjang tersebut nantinya dituangkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), sedangkan perencanaan daerah jangka menengah dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan perencanaan daerah tahunan nantinya dituangkan dalam bentuk dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sekretariat DPRD Kabupaten Sigi sebagai salah satu OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi diwajibkan menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Sigi

Penyusunan RPJMD Kabupaten Tahun 2025-2029 dilakukan secara bersamaan/simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Renstra PD Kabupaten Tahun 2025-2029. Sebagian substansi Renstra PD Kabupaten Tahun 2025-2029 merupakan bagian dari RPJMD Kabupaten Tahun 2025-2029.

Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Kabupaten Tahun 2025-2029 dilakukan dengan menjamin kesinambungan pembangunan daerah terutama dalam rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, terlebih menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik pada aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, maupun pemberdayaan masyarakat.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Sigi Tahun 2021-2026 berpedoman kepada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor: 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
12. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172)
13. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sigi Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Dearah Kabupaten Sigi Nomor 125);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 150);

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan penyusunan dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

a. Maksud

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat DPRD Kabupaten Sigi tahun 2025-2029 untuk memberikan landasan kebijakan pembangunan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2025-2029 khususnya pada Misi ke-5 “Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang transparan dan partisipatif”, serta sebagai media akuntabilitas pada akhir masa jabatan.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan dokumen RENSTRA Tahun 2025-2029 adalah:

1. Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pelaksanaan program kegiatan;
2. Memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran teknis RPJMD pada masing-masing perangkat daerah berdasarkan urusan dan kewenangan sesuai tugas dan fungsi;

3. Menyediakan pedoman dalam penyusunan RENSTRA yang merupakan perencanaan tahunan berupa program beserta target dan pagu yang bersifat indikatif, sebagai bahan lebih lanjut pada penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan yang tercakup dalam RENSTRA Sekretariat DPRD Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah paling sedikit memuat:
 - a. Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah;
 - b. Sumber daya Perangkat Daerah;
 - c. Kinerja pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya); dan
 - d. Kelompok sasaran layanan.
- 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah:
 - a. Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah; dan;
 - b. Isu strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1. Tujuan Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029;

- 3.2. Sasaran Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025-202
- 3.3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029; dan
- 3.4. Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ;

- 4.1. Uraian Program;
- 4.2. Uraian Kegiatan;
- 4.3. Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;
- 4.4. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
- 4.5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan
- 4.6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.



BAB II

Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah



VISI : KABUPATEN SIGI MAJU, BERKELANJUTAN BERBASIS PERTANIAN DAN PARIWISATA

2.1. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

a. Tugas dan Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah;

Sesuai dengan Peraturan Bupati Sigi Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi mempunyai Tugas dan fungsi dan Tata Kerja sebagai berikut :

2.1.1. Tugas;

Sekretariat DPRD mempunyai tugas Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

2.1.2. Fungsi;

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi:

- penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
- penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Sekretariat DPRD, terdiri atas :

- Bagian Umum dan Keuangan;
- Bagian Persidangan dan Perundang-undangan; dan
- Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan.

Bagian Umum dan Keuangan

- (1) Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD menyiapkan perumusan, penyelenggaraan dan pengelolaan urusan umum dan keuangan yang meliputi program dan keuangan, tata usaha dan kepegawaian, dan rumah tangga Sekretariat DPRD dan DPRD.
- (2) Bagian Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan dan penyusunan kebijakan dibidang umum dan kepegawaian;
 - b. penyelenggaraan ketatausahaan Sekretariat DPRD;
 - c. pengelolaan kepegawaian Sekretariat DPRD;
 - d. pengelolaan administrasi keanggotaan DPRD;
 - e. fasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD;
 - f. pengelolaan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD;
 - g. penyediaan fasilitas fraksi DPRD;
 - h. penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga DPRD;
 - i. penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana DPRD;
 - j. penyelenggaraan pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab DPRD;
 - k. penyusunan perencanaan dan evaluasi bahan perencanaan penyusunan anggaran Sekretariat DPRD;
 - l. pelaksanaan verifikasi kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD;
 - m. penyelenggaraan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD;
 - n. pelaksanaan pengelolaan keuangan pimpinan, anggota dan Sekretariat DPRD;
 - o. pengoordinasian pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD;
 - p. pelaksanaan verifikasi dan evaluasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD;
 - q. pengevaluasian pengadministrasian dan akuntansi keuangan Sekretariat DPRD;
 - r. penyusunan laporan kinerja dan anggaran Sekretariat DPRD;
 - s. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dibidang umum dan kepegawaian; dan
 - t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Umum dan Keuangan, terdiri atas:

a. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan

b. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (1) Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang tata usaha dan kepegawaian.
- (2) Uraian tugas Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada, meliputi:
 - a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun rencana kegiatan Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - b. menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan dibidang tata usaha dan kepegawaian;
 - c. melaksanakan surat-menyurat dan naskah dinas Sekretariat DPRD dan pimpinan DPRD serta melaksanakan kearsipan;
 - d. menyiapkan bahan dan menyusun administrasi kepegawaian dan menyusun administrasi kepegawaian Sekretariat DPRD;
 - e. menyusun rencana kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian;
 - f. melaksanakan analisis kebutuhan dan merencanakan penyediaan tenaga ahli;
 - g. menyiapkan bahan administrasi pembuatan daftar Urut kepangkatan dan formasi pegawai;
 - h. melaksanakan penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Sekretariat DPRD;
 - i. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan dibidang tata usaha dan kepegawaian; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Persidangan dan Perundang-undangan

- (1) Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD menyiapkan perumusan, penyelenggaraan dan fasilitasi urusan persidangan dan perundang-undangan yang meliputi kajian perundangundangan, persidangan dan risalah, humas, protokol dan publikasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Bagian Persidangan dan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan dan penyusunan kebijakan dibidang persidangan dan perundang-undangan;
 - b. penyelenggaraan kajian perundang-undangan;
 - c. fasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah;
 - d. fasilitasi penyusunan Naskah Akademik dan draf rancangan peraturan daerah inisiatif;
 - e. pengumpulan bahan penyiapan draf rancangan peraturan daerah Inisiatif;
 - f. pelaksanaan verifikasi, mengevaluasi dan menganalisis produk penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - g. fasilitasi penyelenggaraan persidangan;
 - h. penyusunan risalah rapat;
 - i. pengoordinasian pembahasan rancangan peraturan daerah;
 - j. pelaksanaan verifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi Daftar Inventaris Masalah (DIM);
 - k. pelaksanaan verifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi risalah rapat;
 - l. penyelenggaraan hubungan masyarakat, protokol dan publikasi;
 - m. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dibidang persidangan dan perundang-undangan; dan
 - n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan

- (1) Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD menyiapkan perumusan, penyelenggaraan dan fasilitasi urusan penganggaran dan pengawasan yang meliputi fasilitasi penganggaran, fasilitasi pengawasan, kerja sama dan aspirasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan dan penyusunan kebijakan dibidang fasilitasi penganggaran dan pengawasan;
 - b. fasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan KUA PPAS/KUPA PPAS Perubahan;
 - c. fasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP);
 - d. fasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan Raperda pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD);
 - e. fasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya;
 - f. fasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah;
 - g. fasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
 - h. fasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan aspirasi masyarakat;
 - i. fasilitasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
 - j. fasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
 - k. fasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
 - l. fasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pengawasan pelaksanaan kebijakan;

RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SEKRETARIAT DPRD KAB. SIGI TAHUN 2025-2029

- m. fasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan penyusunan pokok pokok pikiran DPRD;
- n. fasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan persetujuan kerjasama daerah;
- o. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dibidang fasilitasi penganggaran dan pengawasan; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pada masing-masing unit kerja dilingkungan Sekretariat DPRD dapat dibentuk sejumlah kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh Subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan administrator masing-masing.
- (2) Subkoordinator melaksanakan tugas membantu pejabat administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (3) Sub koordinator mengkoordinir pelaksanaan tugas pejabat pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Penugasan Sub koordinator ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama di masing-masing unit kerja.
- (5) Ketentuan mengenai pembagian tugas Sub koordinator ditetapkan dengan keputusan Bupati.

TATA KERJA

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, setiap pimpinan unit organisasi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal dalam unit organisasi masing-masing maupun antar satuan organisasi serta instansi vertikal di Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Setiap pimpinan unit organisasi dalam lingkungan satuan kerja bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

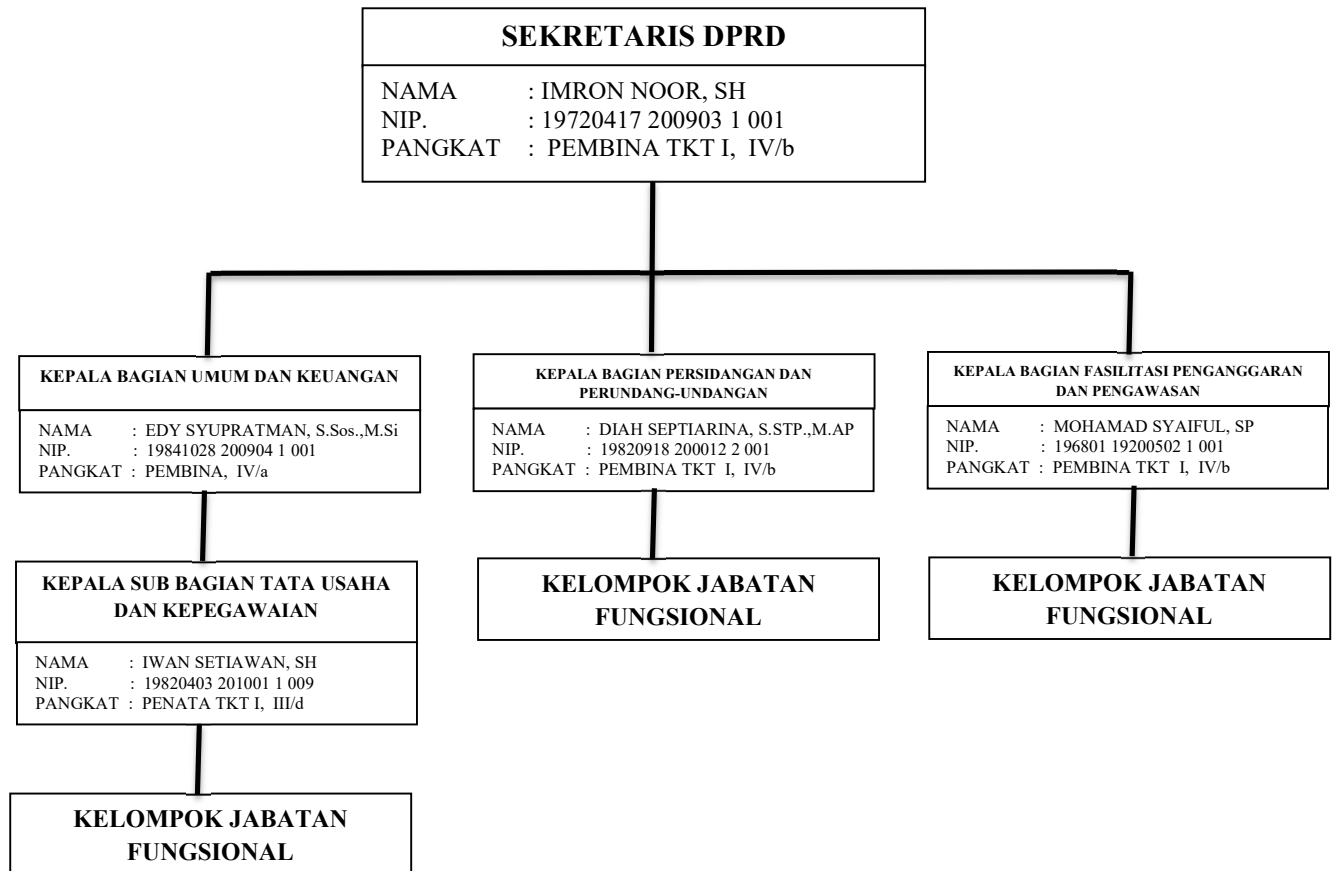
Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan pemberian petunjuk teknis kepada bawahan.

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

2.1.3. Struktur;

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI



b. Sumber Daya Perangkat Daerah;

Pelaksanaan tugas dapat dilaksanakan dengan baik apabila didukung dengan sumber daya yang ada dan memadai, baik personil, anggaran dan sarana prasarana pendukung kegiatan perkantoran.

Berdasarkan data kepegawaian pada Sekretariat DPRD Kabupaten Sigi periode Januari 2025, Pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD berjumlah 141 orang terdiri dari PNS sebanyak 39 dan P3K sebanyak 2 orang dan Pegawai Kotrak Kerja berjumlah 119 orang, Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel dibawah :

a. Susunan Kepegawaian

KEADAAN PEGAWAI MENURUT STATUS KEPEGAWAIAN

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH (Orang)
1	PNS	39
2	P3K (Pegawai Perjanjian Kerja)	2
3	PHL (Honoror)	136
JUMLAH		177

**KEADAAN PEGAWAI MENURUT BIDANG ILMU DAN
TINGKAT PENDIDIKAN**

NO	BIDANG ILMU/ TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH (Orang)
1	Magister sains	2
2	Sarjana Sosial	10
3	Sarjana Pertanian	1
4	Sarjana Hukum	9
5	STPDN	1
6	Sarjana Ekonomi manajemen	3
7	Sarjana Teknik	2
8	D3 Pendidikan	1
9	SMA/SMK	12
JUMLAH		41

KEADAAN PEGAWAI MENURUT GOLONGAN

NO	PANGKAT	GOLONGAN	JUMLAH (Orang)
1	Pembina Utama Madya	IV/c	-
2	Pembina Tingkat I	IV/b	3

3	Pembina	IV/a	2
4	Penata Tingkat I	III/d	7
5	Penata	III/c	5
6	Penata Muda Tingkat I	III/b	6
7	Penata Muda	III/a	9
8	Pengatur Tkt 1	II/d	1
9	Pengatur	II/c	4
10	Pengatur Muda Tingkat 1	II/b	1
11	Pengatur Muda	II/a	1
12	P3K	(IX)	2
JUMLAH			41

KEADAAN PEGAWAI MENURUT ESELON

NO	KEADAAN PEGAWAI	JUMLAH PEGAWAI
1	ESELON II	1 Orang
2	ESELON III	3 Orang
3	ESELON IV	1 Orang
JUMLAH		5 Orang

KEADAAN PEGAWAI MENURUT JABATAN FUNGSIONAL

NO	KEADAAN PEGAWAI	JUMLAH PEGAWAI
1	AHLI PERTAMA III/a - III/b	- Orang
2	AHLI MUDA III/c - III/d	5 Orang
3	AHLI MADYA IV/a - IV/b-IV/c	- Orang
4	AHLI UTAMA IV/d - IV/e	- Orang
JUMLAH		5 Orang

b. *Perlengkapan (Sarana dan Prasarana)*

SARANA DAN PRASARANA KERJA

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Gedung Permanen	3 Buah	Pinjam, Pakai
2.	Kendaraan Roda Empat	10 Unit	Baik
3.	Kendaraan Roda Dua	18 Unit	Baik
4.	Genset	1 Unit	Baik
5.	AC	32 Unit	Baik
6.	Meja Kerja	135 Buah	Baik
7.	Kursi Kerja	170 Buah	Baik
8.	Lemari	68 Buah	Baik
9.	TV	1 Unit	Baik

c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;

Pencapaian indikator kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sigi terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Kabupaten Sigi untuk urusan penunjang

pemerintahan daerah Tahun 2024 dengan target Belanja sebesar Rp.37.926.038.501.- Sedangkan realisasi belanja Sekretariat DPRD Kabupaten Sigi tahun 2024 adalah sebesar Rp. 36.845.580.971,00 atau 97,15% dari anggarannya. Anggaran Belanja Operasi sebesar Rp.34.957.268.101,00 dan terealisasi sebesar Rp. 34.105.515.045,00. atau (97,56) Anggaran Belanja Modal Rp.2.968.770.400,- dan terealisasi sebesar Rp.2.740.065.926,00. Atau 92,30%

Untuk menilai capaian realisasi kegiatan kinerja pada Tahun anggaran 2024 Sekretariat DPRD Kabupaten Sigi diuraikan sebagai berikut :

A. BELANJA OPERASI

Belanja Operasi sebesar Rp. 34.957.268.101,- yang telah terealisasi sebesar Rp. 34.105.515.045,00 atau sudah mencapai 97,56%

B. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai sebesar Pagu Rp. 16.289.956.734,- yang telah terealisasi sebesar Rp.15.921.116.842.00 atau sudah mencapai 97,73 %

a. Gaji dan Tunjangan

Gaji dan Tunjangan Sekretariat DPRD Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 2.315.611.936,- dan terealisasi sebesar Rp.2.278.674.908,- atau mencapai sebesar 98,40%, Tambahan penghasilan ASN sebesar Rp. 698.771.435.- dan terealisasi sebesar Rp.598.986.250,- atau mencapai 85,71%, Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya ASN sebesar Rp.301.680.000,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 300.240.000,- atau mencapai sebesar 99,52% yang dibayarkan kepada 35 orang Pegawai Negeri Sipil Sekretariat DPRD Kabupaten Sigi.

b. Gaji dan Tunjangan DPRD Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2024

sebesar Rp.12.772.293.363.- dan terealisasi sebesar Rp.12.541.615.684.- atau mencapai sebesar 98,19%, yang dibayarkan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sigi sejumlah 30 orang, dan Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD sebesar Rp.201.600.000.- dan yang terealisasi sebesar Rp.201.600.000,- tercapai 100% dan dibayarkan kepada unsur pimpinan DPRD Kabupaten Sigi.

C. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa tahun 2024 sebesar Rp.18.667.311.367,- dan terealisasi sebesar Rp. 18.184.398.203,- atau tercapai sebesar 97,41% dari total nilai Pagu dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Barang

Belanja barang Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp.2.922.397.969,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.903.702.968,- atau mencapai sebesar 99,36% yang merupakan belanja barang pakai habis terdiri dari :

- Belanja bahan bakar dan pelumas yang merupakan kelancaran pelaksanaan tugas perkantoran dan digunakan sebagai bahan bakar kendaraan dinas kantor maupun operasional kantor dan bahan bakar minyak non kendaraan digunakan untuk mesin genzet apabila listrik padam / mati
- Belanja suku cadang alat angkutan yang digunakan untuk kendaraan dinas roda empat maupun roda dua sebagai kendaraan operasional kantor
- Belanja Alat Tulis Kantor untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran dan pelaksanaan rapat-rapat persidangan anggota DPRD Kabupaten sigi
- Belanja cetak dan penggandaan dokumentasi untuk kegiatan kantor
- Belanja barang benda pos untuk kelengkapan administrasi kwitansi pertanggung jawaban keuangan dan lain-lain
- Belanja bahan untuk kegiatan kantor berupa perabot kantor
- Belanja bahan untuk kegiatan kantor berupa alat listrik
- Belanja bahan untuk kegiatan kantor berupa souvenir / cinderamata
- Belanja natura dan pakan natura untuk unsur pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sigi
- Belanja makan minum Kegiatan Rapat-Rapat Anggota DPRD Kabupaten Sigi

- Belanja makan minum Jamuan tamu pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sigi, maupun jamuan tamu sekretariat DPRD Kabupaten Sigi
- Belanja pakaian dinas dan atribut pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sigi, berupa pakaian dinas harian (PSH, PSL dan PDH) pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sigi sejumlah 30 orang.

b. Belanja Jasa

Belanja jasa Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.4.429.350.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.122.779.307,- atau mencapai sebesar 93,07%, meliputi Belanja Jasa Kantor sebesar Rp.4.429.350.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.038.849.307,- atau mencapai sebesar 93,29%, terdiri dari :

- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia.
- Honorarium Rohaniwan
- Belanja Jasa Tenaga Administrasi
- Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer
- Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum
- Belanja Jasa Tenaga Ahli
- Belanja Jasa Tenaga Keamanan
- Belanja Jasa Tenaga Supir
- Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi
- Belanja Tagihan Listrik
- Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah
- Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan
- Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan
- Belanja Lembur
- Belanja Medical Check Up

c. Belanja Pemeliharaan

Belanja pemeliharaan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.438.368.750,- dan terealisasi sebesar Rp. 288.471.578,- atau mencapai sebesar 65,80%.

- Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp.419.150.000.- dan terealisasi sebesar Rp. 269.271.578.- atau mencapai 64,24%,
- Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set
- Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin
- Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer
- Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer
- Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor
- d. Belanja Perjalanan Dinas
 - Belanja Perjalanan Dinas Biasa
 - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

D. BELANJA MODAL

Belanja modal Sekretariat DPRD Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 2.968.770.400,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.740.065.926,- atau mencapai 92,29%. Sebagai berikut :

- **Belanja Peralatan dan Mesin**

Belanja Peralatan dan Mesin yang dianggarkan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.2.656.020.400,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.508.414.000,- atau mencapai sebesar 94,44%.

Belanja peralatan dan mesin tahun 2024 dapat dirinci sebagai berikut:

- Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga
- Belanja Modal Alat Rumah Tangga
- Belanja Modal Mebel
- Belanja Modal Alat Pendingin

- Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat
 - Belanja Modal Komputer Unit
 - Belanja Modal Personal Computer
 - Belanja Modal Peralatan Personal Computer
 - Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya
- **Belanja Modal Aset tidak berwujud**
Belanja aset tidak berwujud dianggarkan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.180.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.99.636.000,- atau mencapai sebesar 55,35%.
 - **Belanja Modal Bangunan Gedung**
Belanja modal bangunan gedung dianggarkan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.82.750.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 82.095.926,- atau mencapai sebesar 99,20%.
 - **Belanja Modal Aset tetap lainnya**
Belanja modal aset tetap lainnya dianggarkan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.50.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.49.920.000,- atau mencapai sebesar 99,83%.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah;

Sekretariat DPRD merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang membantu tugas Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pemerintahan umum dengan fungsi koordinasi, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan seluruh penyelenggaraan tugas pimpinan dan anggota DPRD.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat DPRD secara teknis membantu kelancaran tugas pimpinan dan anggota DPRD, dan secara administrasi bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam memberikan pelayanan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, tugas sekretariat DPRD Kabupaten Sigi dituntut semakin cepat, tepat serta mampu meletakkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara tegas dengan bertambahnya dinamika administrasi pemerintahan dan politik yang ada.

Berdasarkan analisis identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Sigi diatas, maka secara normatif, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, disamping menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Permasalahan pokok yang dihadapi antara lain :

- 1) Perluasan jenis layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik yang responsif berbasis Teknologi Informasi (E-Government);
- 2) Isu transparansi perencanaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan berbasis Teknologi Informasi dengan data yang andal dan terbarukan.

b. Isu Strategis

Permasalahan-permasalahan yang sering muncul sehingga dijadikan isu yang strategis berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pelayanan antara lain sebagai berikut:

1. Tingginya standar pelayanan yang dibutuhkan anggota DPRD
2. Semakin besarnya volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai lembaga perwakilan
3. Semakin pesatnya tuntutan DPRD pada akses teknologi dan informasi untuk meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD

Tabel 2.1. Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Sigi

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Ketersediaan Anggaran untuk mendukung Pelayanan kepada Anggota DPRD	Tingginya standar pelayanan yang dibutuhkan anggota DPRD	Pengelolaan dan Perencanaan Keuangan yang relevan	Keterbukaan data Informasi Keuangan Perangkat Daerah	Sistem Perencanaan terintegrasi dan tepat sasaran	Kolaborasi lintas daerah dalam perencanaan	Optimalisasi Anggaran dalam mendukung pelayanan
Dukungan Ketersediaan Sumber Daya Manusia	Semakin besarnya volume kegiatan DPRD dalam	Penguatan tata Kelola Kegiatan dalam pelaksanaan	Transformasi data Sumber Daya Manusia (SDM)	Sistem Peningkatan Kualitas Sumber Daya	Sinergi dalam ketersediaan Sumber Daya	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SEKRETARIAT DPRD KAB. SIGI TAHUN 2025-2029

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(SDM) yang profesional	pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai lembaga perwakilan	tugas dan fungsi		Manusia (SDM)	Manusia (SDM) yang profesional	(SDM) yang profesional
Tersedianya Jaringan Mitra Komunikasi dalam Akses Teknologi Informasi	Semakin pesatnya tuntutan DPRD pada Akses teknologi dan Informasi untuk meningkatkan Kinerja Sekretariat DPRD	Tata kelola mitra kerja sama dengan media informasi	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Publik	Modernisasi sarana dan prasarana informasi publik	Pemanfaatan Mitra Kerja Sama Media Informasi Regional	Mitra kerja sama bersama media informasi (pihak ketiga)



BAB III

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan



VISI : KABUPATEN SIGI MAJU, BERKELANJUTAN BERBASIS PERTANIAN DAN PARIWISATA

3.1. Tujuan Rencana Strategi Sekretariat DPRD Kabupaten Sigi Thn 2025-2029

Tujuan dan sasaran adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pencapaian misi dan visi organisasi. Tujuan adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pencapaian misi dan visi organisasi. merupakan penjabaran Misi, Sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, dan program dalam rangka merealisasikan misi. Tujuan dibatasi jumlahnya agar lebih terfokus; meskipun demikian tujuan belum bersifat spesifik dan tidak terukur.

Sasaran bersifat lebih rinci dan memperlihatkan langkah atau gerakan menuju pencapaian tujuan. Sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan, atau bulanan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terkunci, dapat diukur dan dapat dicapai. Sasaran merupakan target yang bersifat spesifik dan terukur dari tiap tujuan biasanya disusun beberapa sasaran. Karena yang dapat diukur adalah sasaran, maka bila semua sasaran telah tercapai maka tujuan dianggap tercapai pula. Maka tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD Kabupaten Sigi beserta Indikator kinerja disajikan dalam Tabel sebagai berikut:

Gambar 3.1. Logframe Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Sigi

MISI 5	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Partisipatif
TUJUAN	Meningkatkan Pemerintahan yang bersih, Transparan dan Akuntabel dengan Partisipasi masyarakat
INDIKATOR TUJUAN	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD
Sasaran Strategis	1.Meningkatnya kualitas layanan Pendukung penyelenggaraan Legislasi, Budgeting, dan Pengawasan DPRD 2.Meningkatnya efektivitas administrasi kesekretariatan
Indikator Sasaran Strategis	1.Persentase Penetapan Perda 2.Persentase Ketepatan waktu penyelesaian Pembahasan Anggaran 3.Persentase rekomentasi hasil pengawasan DPRD terhadap eksekutif

Tabel. 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra
Sekretariat DPRD Kabupaten Sigi tahun 2025-2030

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja						Ket
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Terwujud dan Terlaksananya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Terwujudnya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD		Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	%	95,00	95,95	96,91	97,88	98,86	99,85	
Meningkatnya Pelayanan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD		Meningkatnya dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase kepuasan DPRD terhadap Pelayanan	%	95,00	95,95	96,91	97,88	98,86	99,85	

**Tabel.3.2 Penahapan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Sigi
Tahun 2026-2030**

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
1	2	3	4	5
Menilai kebutuhan pelatihan dan pengembangan kapasitas anggota DPRD terkait kebijakan, peraturan, dan isu strategis daerah. Menyusun program pelatihan dan workshop rutin yang relevan untuk meningkatkan pemahaman mereka.	Implementasi Pelatihan dan Workshop bagi Anggota DPRD dengan menyelenggarakan pelatihan dan workshop rutin untuk anggota DPRD dengan fokus pada kebijakan publik, peraturan perundang-undangan, serta isu-isu strategis daerah yang mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif	Membangun forum diskusi dan konsultasi yang melibatkan DPRD dan pemerintah daerah untuk memperkuat komunikasi dan sinergi, guna mempercepat proses pengambilan keputusan terkait pembangunan daerah	Mendorong kolaborasi lebih erat antara DPRD dan pemerintah daerah dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah melalui kerja sama dalam komite atau kelompok kerja yang melibatkan kedua belah pihak	Melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelatihan dan forum diskusi yang telah dilaksanakan, serta menyempurnakan program pelatihan dan mekanisme kolaborasi untuk meningkatkan sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan

**Tabel.3.3 Tehnik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Sigi
Tahun 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat DPRD Kab. Sigi											
- Meningkatnya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Meningkatkan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD		Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD (Indeks)	94	95	95,95	96,91	97,88	98,86	99,85	
		Meningkatnya kualitas layanan pendukung penyelenggaraan Legislasi, Budgeting dan Pengawasan DPRD	Persentase Penetapan PERDA (%)	-	80	85	90	95	100	100	
			Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Pembahasan Anggaran (%)	-	100	100	100	100	100	100	
			Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan DPRD terhadap Eksekutif (%)	-	70	75	80	85	90	95	
		Meningkatnya efektifitas administrasi kesekretariatan	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	CC	B	B	B	BB	BB	BB	

**Tabel.3.4 Arah Kebijakan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Sigi
Tahun 2025-2029**

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket.
1	2	3	4	5
	Kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.	Peningkatan Kapasitas dan Sinergi antara DPRD dan Pemerintah Daerah: Mengadakan pelatihan dan workshop rutin bagi anggota DPRD untuk meningkatkan pemahaman mereka mengenai kebijakan, peraturan perundang-undangan, serta isu-isu strategis daerah. Selain itu, memperkuat komunikasi dan kolaborasi antara DPRD dan pemerintah daerah melalui forum diskusi dan Konsultasi, guna mempercepat pengambilan keputusan yang mendukung pembangunan daerah.	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD dan bersinergi antara DPRD dan Pemerintah Daerah: Adanya Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD, dalam penyusunan, pembahasan Peraturan Daerah maupun Naskah Akademik, Pembahasan KUA PPAS, Pembahasan APBD, maupun pembahasan pertanggungjawaban APBD. Menyediakan Kelompok pakar dan Ahli maupun penyediaan tenaga ahli fraksi. Adanya kegiatan penyerapan penghimpunan Aspirasi Masyarakat yaitu Kegiatan Reses yang dilaksanakan pada setiap Daerah Pemilihan. Mengadakan pelatihan dan workshop rutin bagi anggota DPRD untuk meningkatkan pemahaman mereka mengenai kebijakan, peraturan perundang-undangan, serta isu-isu strategis daerah. Selain itu, memperkuat komunikasi dan kolaborasi antara DPRD dan pemerintah daerah melalui forum diskusi dan Konsultasi, guna mempercepat pengambilan keputusan yang mendukung pembangunan daerah.	



BAB IV

Program Kegiatan, Subkegiatan dan Kinerja Penyelenggara Bidang Urusan



VISI : KABUPATEN SIGI MAJU, BERKELANJUTAN BERBASIS PERTANIAN DAN PARIWISATA

4.1. Rencana Program Kegiatan dan Pendanaan

Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Sigi berpedoman pada Rencana Kerja (Renja), Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Sigi dan RPJMD Kabupaten Sigi 2025-2029. Semuanya memiliki indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Sigi diantaranya adalah :

Untuk mengoperasionalkan kebijakan-kebijakan tersebut perlu ditetapkan program-program dan kegiatan-kegiatan nyata sehingga kegiatan strategi yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan.

a. Program Urusan SKPD :

- Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
- Program Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD

b. Program Urusan Wajib Sekretariat DPRD:

- Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah;

Rencana program dan prioritas tersebut dimaksud secara operasional dilaksanakan oleh bagian-bagian terkait di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Sigi dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

Program ini dimaksudkan untuk penyediaan barang dan jasa perkantoran dengan beberapa kegiatan rutin yang dilaksanakan, yaitu :

Keg.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub.Keg.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Keg.	Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub.Keg.	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
Sub.Keg.	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan SKPD
Keg.	Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub.Keg.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Sub.Keg.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sub.Keg.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Sub.Keg.	Fasilitasi Kunjungan Tamu

Sub.Keg.	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
Keg.	Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub.Keg.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Sub.Keg.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sub.Keg.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Keg.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub.Keg.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Sub.Keg.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Keg.	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
Sub.Keg.	Penyelenggaraan Administrasi dan Keuangan DPRD
Sub.Keg.	Pelaksanaan Medical Chek Up DPRD
Keg.	Layanan Adminitrasi DPRD
Sub.Keg.	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
Sub.Keg.	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD

Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Program ini dimaksudkan untuk penyediaan Tugas dan Fungsi DPRD antara lain :

PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	
Keg.	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
Sub.Keg.	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
Sub.Keg.	Fasilitasi penyusunan/pembahasan naskah akademik
Sub.Keg.	Pembahasan KUA PPAS
Sub.Keg.	Pembahasan APBD
Sub.Keg.	Pembahasan Pertanggunjawaban APBD
Keg.	Peningkatan Kapasitas DPRD
Sub.Keg.	Penyediaan Kelompok Pakar dan Ahli
Sub.Keg.	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
Keg.	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
Sub.Keg.	Kunjungan Dalam Daerah
Sub.Keg.	Pelaksanaan Reses
Keg.	Pembahasan Kerja Sama Daerah
Sub.Keg.	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi
Keg.	Fasilitasi Tugas DPRD
Sub.Keg.	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
Sub.Keg.	Fasilitasi Tugas Badan Musyawarah
Sub.Keg.	Fasilitasi Tugas Panitia Khusus

Indikator kinerja Sekretaris DPRD Kabupaten Sigi yang selanjutnya disebut Indikator Kinerja OPD adalah sebagai tolak ukur kinerja pembangunan Kabupaten Sigi selama periode Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 sebagai komitmen dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029.

Pelaksanaan indikator kinerja yang ditetapkan Sekretariat DPRD Kabupaten Sigi berorientasi kepada pencapaian program yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029 dalam mendukung tujuan dan sasaran. Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Kabupaten Sigi yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel. 4.1 Program Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Sigi

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.02 - SEKRETARIAT DPRD					25.948.199.391		26.467.163.380		29.996.506.647		27.536.436.780		28.087.165.515	
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					19.415.071.907		19.803.373.346		23.199.440.813		20.603.429.629		21.015.498.221	
Meningkatnya kelancaran administrasi kesekretariatan	Persentase kelancaran administrasi program, keuangan, umum dan kepegawaian (%)	100	100	100	19.415.071.907	100	19.803.373.346	100	23.199.440.813	100	20.603.429.629	100	21.015.498.221	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					6.533.127.484		6.663.790.034		6.797.065.834		6.933.007.151		7.071.667.294	
Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang undangan	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD (Indeks)	100	100	100	6.533.127.484	100	6.663.790.034	100	6.797.065.834	100	6.933.007.151	100	7.071.667.294	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
TOTAL KESELURUHAN					25948199391.00		26467163380.00		29996506647.00		27536436780.00		28087165515.00	

Tabel. 4.2 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Sigi

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang transparan dan partisipatif	Meningkatkan Pemerintahan yang bersih transparan dan akutabel dengan partisipasi masyarakat				Meningkatnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi		
		Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan sekretariat DPRD	Meningkatnya tingkat kepuasan Anggota terhadap pelayanan sekretariat DPRD	Terpenuhinya pelayanan Sekretariat terhadap Anggota DPRD	Presentase capaian pelayanan sekretariat DPRD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersusunnya Laporan Perencanaan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah orang yang menerima gaji (ASN)	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKP	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan SKPD	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Persentase luaran dokumen administrasi umum yang menjadi masukandalam pengelolaan administrasi umumperangkat daera	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Persentase luaran dokumen administrasi umum yang menjadi masukandalam pengelolaan administrasi umumperangkat daerah	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Persentase luaran dokumen administrasi umum yang menjadi masukandalam pengelolaan administrasi umumperangkat daerah	Fasilitasi Kunjungan Tamu	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyura	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediaka	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpeliharanya Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya layanan keuangan dan Kesejahteraan DPRD		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	
					Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Penyelenggaraan Administrasi dan Keuangan DPRD	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	
				Tersedianya layanan administrasi DPRD		Layanan Adminitrasi DPRD	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	
		Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan sekretariat DPRD	Meningkatnya tingkat kepuasan Anggota terhadap pelayanan sekretariat DPRD	Terpenuhinya pelayanan Sekretariat terhadap Anggota DPRD	Presentase capaian pelayanan sekretariat DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	
				Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Persentase Peraturan daerah dan peraturan DPRD yang dibahas tepat waktu	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Fasilitasi penyusunan/pembahasan naskah akademik	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Pembahasan KUA PPAS	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Pembahasan APBD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	
				Presentase Pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sesuai dengan tata tertib DPRD yang berlaku		Peningkatan Kapasitas DPRD	
					Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Penyediaan Kelompok Pakar dan Ahli	
					Jumlah Tenaga Ahli Fraks	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Presentase Pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sesuai dengan tata tertib DPRD yang berlaku		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	
					Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Kunjungan Dalam Daerah	
					Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Pelaksanaan Reses	
				Presentase Pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sesuai dengan tata tertib DPRD yang berlaku		Pembahasan Kerja Sama Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	
				Presentase Pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sesuai dengan tata tertib DPRD yang berlaku		Fasilitasi Tugas DPRD	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Fasilitasi Tugas Badan Musyawarah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Fasilitasi Tugas Panitia Khusus	

**Tabel.4.3 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Sigi
Tahun 2026-2030**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.02 - SEKRETARIAT DPRD				25.948.199.39 1		26.467.163.38 0		29.996.506.64 7		27.536.436.78 0		28.087.165.51 5		
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				19.415.071.90 7		19.803.373.34 6		23.199.440.81 3		20.603.429.62 9		21.015.498.22 1		
Meningkatnya kelancaran administrasi kesekretariatan	Persentase kelancaran administrasi program, keuangan, umum dan kepegawaian (%)	100	100	19.415.071.90 7	100	19.803.373.34 6	100	23.199.440.81 3	100	20.603.429.62 9	100	21.015.498.22 1	4.02.0.00.0.00.01.00 00 - Sekretariat DPRD Kab. Sigi	
4.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				250.000.000		250.000.000		550.000.000		250.000.000		350.000.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)		5	250.000.000	5	250.000.000	5	550.000.000	5	250.000.000	5	350.000.000		
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Dokumen)		2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		5		5		5		5		5			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		40		40		40		40		40			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)		2		2		2		2		2			
	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)		40		40		40		40					
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)		2		2		2		2					
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)		30		30		30		30					
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		10	10	10	10								
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)		2	2	2	2								
4.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				25.000.000		25.000.000		55.000.000		25.000.000		35.000.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		10	25.000.000	10	25.000.000	10	55.000.000	10	25.000.000	10	35.000.000		
4.02.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				25.000.000		25.000.000		55.000.000		25.000.000		35.000.000		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)		2	25.000.000	2	25.000.000	2	55.000.000	2	25.000.000	2	35.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.02.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD				25.000.000		25.000.000		55.000.000		25.000.000		35.000.000		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD (Dokumen)		2	25.000.000	2	25.000.000	2	55.000.000	2	25.000.000	2	35.000.000		
4.02.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD				25.000.000		25.000.000		55.000.000		25.000.000		35.000.000		
Tersedianya Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD (Dokumen)		2	25.000.000	2	25.000.000	2	55.000.000	2	25.000.000	2	35.000.000		
4.02.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				25.000.000		25.000.000		55.000.000		25.000.000		35.000.000		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD (Dokumen)		2	25.000.000	2	25.000.000	2	55.000.000	2	25.000.000	2	35.000.000		
4.02.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				25.000.000		25.000.000		55.000.000		25.000.000		35.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		5	25.000.000	5	25.000.000	5	55.000.000	5	25.000.000	5	35.000.000		
4.02.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				25.000.000		25.000.000		55.000.000		25.000.000		35.000.000		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		40	25.000.000	40	25.000.000	40	55.000.000	40	25.000.000	40	35.000.000		
4.02.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				25.000.000		25.000.000		55.000.000		25.000.000		35.000.000		
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)		30	25.000.000	30	25.000.000	30	55.000.000	30	25.000.000	30	35.000.000		
4.02.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				25.000.000		25.000.000		55.000.000		25.000.000		35.000.000		
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)		40	25.000.000	40	25.000.000	40	55.000.000	40	25.000.000	40	35.000.000		
4.02.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD				25.000.000		25.000.000		55.000.000		25.000.000		35.000.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)		5	25.000.000	5	25.000.000	5	55.000.000	5	25.000.000	5	35.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.209.489.718		3.209.489.718		3.946.489.718		3.209.489.718		3.249.489.718		
Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		32	3.209.489.718	32	3.209.489.718	32	3.946.489.718	32	3.209.489.718	32	3.249.489.718		
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD (Laporan)		4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		5		5		5		5		5			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)		9		9		9		9		9			
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)		5		5		5		5		5			
	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)		3		3		3		3		3			
4.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				2.876.413.718		2.876.413.718		3.476.413.718		2.876.413.718		2.876.413.718		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		32	2.876.413.718	32	2.876.413.718	32	3.476.413.718	32	2.876.413.718	32	2.876.413.718		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.02.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				233.076.000		233.076.000		250.076.000		233.076.000		233.076.000		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)		9	233.076.000	9	233.076.000	9	250.076.000	9	233.076.000	9	233.076.000		
4.02.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				25.000.000		25.000.000		55.000.000		25.000.000		35.000.000		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)		5	25.000.000	5	25.000.000	5	55.000.000	5	25.000.000	5	35.000.000		
4.02.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				25.000.000		25.000.000		55.000.000		25.000.000		35.000.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		5	25.000.000	5	25.000.000	5	55.000.000	5	25.000.000	5	35.000.000		
4.02.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				25.000.000		25.000.000		55.000.000		25.000.000		35.000.000		
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)		3	25.000.000	3	25.000.000	3	55.000.000	3	25.000.000	3	35.000.000		
4.02.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				25.000.000		25.000.000		55.000.000		25.000.000		35.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD (Laporan)		4	25.000.000	4	25.000.000	4	55.000.000	4	25.000.000	4	35.000.000		
4.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				2.007.016.939		2.057.016.939		3.159.728.700		2.057.016.939		2.292.652.589		
Tersusunnya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		12	2.007.016.939	12	2.057.016.939	12	3.159.728.700	12	2.057.016.939	12	2.292.652.589		
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)		40		40		40		40		40			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)		40		40		40		40		40			
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)		12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		5		5		5		5		5			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		5		5		5		5		5			
4.02.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				186.364.350		186.364.350		250.000.000		186.364.350		250.000.000		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		5	186.364.350	5	186.364.350	5	250.000.000	5	186.364.350	5	250.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.02.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				30.000.000		30.000.000		75.000.000		30.000.000		75.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		5	30.000.000	5	30.000.000	5	75.000.000	5	30.000.000	5	75.000.000		
4.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				105.000.000		105.000.000		157.000.000		105.000.000		157.000.000		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		1	105.000.000	1	105.000.000	1	157.000.000	1	105.000.000	1	157.000.000		
4.02.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				175.000.000		175.000.000		250.000.000		175.000.000		250.000.000		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		12	175.000.000	12	175.000.000	12	250.000.000	12	175.000.000	12	250.000.000		
4.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1.137.923.889		1.187.923.889		2.055.000.000		1.187.923.889		1.187.923.889		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		12	1.137.923.889	12	1.187.923.889	12	2.055.000.000	12	1.187.923.889	12	1.187.923.889		
4.02.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				186.364.350		186.364.350		186.364.350		186.364.350		186.364.350		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)		40	186.364.350	40	186.364.350	40	186.364.350	40	186.364.350	40	186.364.350		
4.02.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				186.364.350		186.364.350		186.364.350		186.364.350		186.364.350		
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)		40	186.364.350	40	186.364.350	40	186.364.350	40	186.364.350	40	186.364.350		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.562.140.800		1.697.140.800		2.190.000.000		1.733.700.577		1.855.545.064		
Penyediaan jasa Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)		12	1.562.140.800	12	1.697.140.800	12	2.190.000.000	12	1.733.700.577	12	1.855.545.064		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
4.02.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				75.000.000		85.000.000		105.000.000		121.559.777		105.000.000		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	75.000.000	12	85.000.000	12	105.000.000	12	121.559.777	12	105.000.000		
4.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				350.000.000		400.000.000		500.000.000		400.000.000		500.000.000		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	350.000.000	12	400.000.000	12	500.000.000	12	400.000.000	12	500.000.000		
4.02.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				45.000.000		45.000.000		85.000.000		45.000.000		85.000.000		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)		12	45.000.000	12	45.000.000	12	85.000.000	12	45.000.000	12	85.000.000		
4.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.092.140.800		1.167.140.800		1.500.000.000		1.167.140.800		1.165.545.064		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	12	1.092.140.800	12	1.167.140.800	12	1.500.000.000	12	1.167.140.800	12	1.165.545.064		
4.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				440.963.600		450.963.600		660.000.000		660.000.000		660.000.000		
Tersusunnya Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		2	440.963.600	2	450.963.600	2	660.000.000	2	660.000.000	2	660.000.000		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		27		27		27		27		27			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		9		9		9		9		9			
4.02.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				329.213.600		329.213.600		455.000.000		455.000.000		455.000.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		27	329.213.600	27	329.213.600	27	455.000.000	27	455.000.000	27	455.000.000		
4.02.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				36.750.000		36.750.000		55.000.000		55.000.000		55.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		9	36.750.000	9	36.750.000	9	55.000.000	9	55.000.000	9	55.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.02.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehab ilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				75.000.000		85.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehab ilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		2	75.000.000	2	85.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000		
4.02.01.2.15 - Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD				11.252.810.85 0		11.402.810.85 0		11.493.222.39 5		11.493.222.39 5		11.407.810.85 0		
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD (Orang/Bulan)		30	11.252.810.85 0	30	11.402.810.85 0	30	11.493.222.39 5	30	11.493.222.39 5	30	11.407.810.85 0		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD (Orang)		30		30		30		30		30			
4.02.01.2.15.0001 - Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD				11.162.810.85 0		11.312.810.85 0		11.395.722.39 5		11.395.722.39 5		11.312.810.85 0		
Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD (Orang/Bulan)		30	11.162.810.85 0	30	11.312.810.85 0	30	11.395.722.39 5	30	11.395.722.39 5	30	11.312.810.85 0		
4.02.01.2.15.0003 - Pelaksanaan Medical Check Up DPRD				90.000.000		90.000.000		97.500.000		97.500.000		95.000.000		
Terlaksananya Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD (Orang)		30	90.000.000	30	90.000.000	30	97.500.000	30	97.500.000	30	95.000.000		
4.02.01.2.16 - Layanan Administrasi DPRD				692.650.000		735.951.439		1.200.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000		
Tersedianya Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (Laporan)		30	692.650.000	30	735.951.439	30	1.200.000.000	30	1.200.000.000	30	1.200.000.000		
	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan (Paket)		1		1		1		1		1			

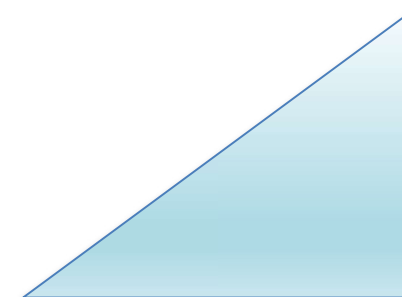
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD (Laporan)		30		30		30		30		30			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD (Dokumen)		30		30		30		30		30			
4.02.01.2.16.0001 - Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD				173.162.500		175.162.500		250.000.000		250.000.000		250.000.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD (Dokumen)		30	173.162.500	30	175.162.500	30	250.000.000	30	250.000.000	30	250.000.000		
4.02.01.2.16.0002 - Fasilitasi Fraksi DPRD				173.162.500		175.162.500		250.000.000		250.000.000		250.000.000		
Terlaksananya Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD (Laporan)		30	173.162.500	30	175.162.500	30	250.000.000	30	250.000.000	30	250.000.000		
4.02.01.2.16.0003 - Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				173.162.500		210.463.939		350.000.000		350.000.000		350.000.000		
Terlaksananya Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (Laporan)		30	173.162.500	30	210.463.939	30	350.000.000	30	350.000.000	30	350.000.000		
4.02.01.2.16.0004 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD				173.162.500		175.162.500		350.000.000		350.000.000		350.000.000		
Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan (Paket)		1	173.162.500	1	175.162.500	1	350.000.000	1	350.000.000	1	350.000.000		
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				6.533.127.484		6.663.790.034		6.797.065.834		6.933.007.151		7.071.667.294		
Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang undangan	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD (Indeks)	100	100	6.533.127.484	100	6.663.790.034	100	6.797.065.834	100	6.933.007.151	100	7.071.667.294	4.02.0.00.0.00.01.00 00 - Sekretariat DPRD Kab. Sigi	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.02.02.2.01 - Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD				239.200.000		240.000.000		242.000.000		244.000.000		245.000.000		
Pembentukan Perda dan Perda Inisiatif DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Dokumen)	6	6	239.200.000	6	240.000.000	6	242.000.000	6	244.000.000	6	245.000.000		
4.02.02.2.01.0001 - Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				239.200.000		240.000.000		242.000.000		244.000.000		245.000.000		
Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Dokumen)	6	6	239.200.000	6	240.000.000	6	242.000.000	6	244.000.000	6	245.000.000		
4.02.02.2.02 - Pembahasan Kebijakan Anggaran				121.800.000		121.800.000		121.800.000		121.800.000		121.800.000		
Pembahasan KUA PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (Dokumen)	40	40	121.800.000	40	121.800.000	40	121.800.000	40	121.800.000	40	121.800.000		
	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS (Dokumen)	40	40		40		40		40					
4.02.02.2.02.0001 - Pembahasan KUA dan PPAS				60.900.000		60.900.000		60.900.000		60.900.000		60.900.000		
Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS (Dokumen)	40	40	60.900.000	40	60.900.000	40	60.900.000	40	60.900.000	40	60.900.000		
4.02.02.2.02.0002 - Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				60.900.000		60.900.000		60.900.000		60.900.000		60.900.000		
Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (Dokumen)	40	40	60.900.000	40	60.900.000	40	60.900.000	40	60.900.000	40	60.900.000		
4.02.02.2.03 - Pengawasan				234.750.000		234.750.000		234.750.000		234.750.000		234.750.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Penyelenggaraan Pemerintahan														
Pembahasan Pertanggungjawabana APBD	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Dokumen)	1	1	234.750.000	1	234.750.000	1	234.750.000	1	234.750.000	1	234.750.000		
4.02.02.2.03.0008 - Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawabana Kepala Daerah				234.750.000		234.750.000		234.750.000		234.750.000		234.750.000		
Terlaksananya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawabana Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Dokumen)	1	1	234.750.000	1	234.750.000	1	234.750.000	1	234.750.000	1	234.750.000		
4.02.02.2.04 - Peningkatan Kapasitas DPRD				678.000.000		678.000.000		678.000.000		678.000.000		678.000.000		
Penyediaan Tenaga Ahli dan Fraksi DPRD	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli (Orang)	6	6	678.000.000	6	678.000.000	6	678.000.000	6	678.000.000	6	678.000.000		
	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi (Orang)	6	6		6		6		6		6			
4.02.02.2.04.0004 - Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli				390.000.000		390.000.000		390.000.000		390.000.000		390.000.000		
Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli (Orang)	6	6	390.000.000	6	390.000.000	6	390.000.000	6	390.000.000	6	390.000.000		
4.02.02.2.04.0005 - Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi				288.000.000		288.000.000		288.000.000		288.000.000		288.000.000		
Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi (Orang)	6	6	288.000.000	6	288.000.000	6	288.000.000	6	288.000.000	6	288.000.000		
4.02.02.2.05 - Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat				2.176.569.900		2.176.569.900		2.176.569.900		2.176.569.900		2.176.569.900		
Penghimpunan Aspirasi Masyarakat (Reses)	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (Dokumen)	30	30	2.176.569.900	30	2.176.569.900	30	2.176.569.900	30	2.176.569.900	30	2.176.569.900		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
4.02.02.2.05.0001 - Kunjungan Kerja dalam Daerah				1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		
Terselenggaranya Kunjungan Kerja DPRD	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD (Laporan)	12	12	1.500.000.000	12	1.500.000.000	12	1.500.000.000	12	1.500.000.000	12	1.500.000.000		
4.02.02.2.05.0003 - Pelaksanaan Reses				676.569.900		676.569.900		676.569.900		676.569.900		676.569.900		
Terlaksananya Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (Dokumen)	30	30	676.569.900	30	676.569.900	30	676.569.900	30	676.569.900	30	676.569.900		
4.02.02.2.07 - Pembahasan Kerja Sama Daerah				888.400.000		888.400.000		888.400.000		888.400.000		888.400.000		
Penyusunan bahan komunikasi dan publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun (Dokumen)	12	12	888.400.000	12	888.400.000	12	888.400.000	12	888.400.000	12	888.400.000		
4.02.02.2.07.0002 - Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi				888.400.000		888.400.000		888.400.000		888.400.000		888.400.000		
Tersusunnya Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun (Dokumen)	12	12	888.400.000	12	888.400.000	12	888.400.000	12	888.400.000	12	888.400.000		
4.02.02.2.08 - Fasilitasi Tugas DPRD				2.194.407.584		2.324.270.134		2.455.545.934		2.589.487.251		2.727.147.394		
Fasilitasi dan koordinasi konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (Dokumen)	30	30	2.194.407.584	30	2.324.270.134	30	2.455.545.934	30	2.589.487.251	30	2.727.147.394		
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah (Dokumen)	1	1				1				1			
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus (Dokumen)	5	5				5				5			
4.02.02.2.08.0001 - Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				2.104.407.584		2.234.270.134		2.365.545.934		2.499.487.251		2.637.147.394		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (Dokumen)	30	30	2.104.407.584	30	2.234.270.134	30	2.365.545.934	30	2.499.487.251	30	2.637.147.394		
4.02.02.2.08.0003 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah (Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah (Dokumen)	1	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000		
4.02.02.2.08.0005 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus				60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus (Dokumen)	5	5	60.000.000	5	60.000.000	5	60.000.000	5	60.000.000	5	60.000.000		

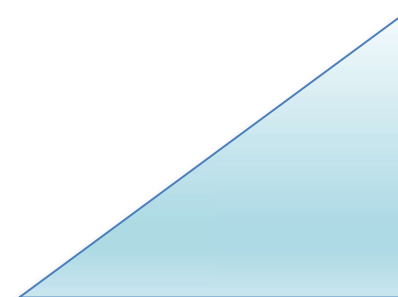


**Tabel.4.4 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Penunjang dan Pendanaan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Sigi
Tahun 2026-2030**

BIDANG URUSAN DAN PROGRAM	OUTCOME DAN INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				TAHUN 1		TAHUN 2		TAHUN 3		TAHUN 4		TAHUN 5		
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	Rp.	TAR GET	Rp.	TAR GET	Rp.	TAR GET	Rp.	TAR GET	Rp.	
1	2			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			6.405.026.945,00		6.533.127.483,90		6.663.790.033,58		6.797.065.834,25		6.933.007.150,93		7.071.667.293,95	
	Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundangundangan													
1	Penetapan Perda APBD Tahun N	Angka		6		6		6		6		6		
2	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	Angka		3		3		3		3		3		
	Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan													
1	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	%		100		100		100		100		100		

**Tabel. 4.5 Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Renstra Sekretariat DPRD
Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat DPRD Kab. Sigi									
2.	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks	94	95	95,95	96,91	97,88	98,86	99,85	



**Tabel. 4.6 Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Renstra Sekretariat DPRD
Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	Ket.
1	2	3	4	5
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Meningkatnya Dukungan Pelayanan atas Tugas dan Fungsi DPRD		
			Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	
			Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	
			Fasilitasi penyusunan/pembahasan naskah akademik	
			Pembahasan KUA PPAS	
			Pembahasan APBD	
			Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	
			Peningkatan Kapasitas DPRD	
			Penyediaan Kelompok Pakar dan Ahli	
			Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	
			Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	
			Kunjungan Dalam Daerah	
			Pelaksanaan Reses	

Tabel 4.7 Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Sigi
Tahun 2025-2030

No	Indikator	Satuan	Target Kinerja						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	72,26	74,07	75,92	77,82	79,76	81,76	
2	Opini BPK atas Laporan Keuangan	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	

Tabel 4.8 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Sigi
Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	4.02 - SEKRETARIAT DPRD										
2.	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	positif	Indeks	94	95	95,95	96,91	97,88	98,86	99,85	
3.	Persentase Penetapan PERDA	positif	%	-	80	85	90	95	100	100	
4.	Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Pembahasan Anggaran	positif	%	-	100	100	100	100	100	100	
5.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan DPRD terhadap Eksekutif	positif	%	-	70	75	80	85	90	95	



BAB V

Penutup



VISI : KABUPATEN SIGI MAJU, BERKELANJUTAN BERBASIS PERTANIAN DAN PARIWISATA

Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat DPRD Kabupaten Sigi tahun 2025-2029 disusun berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Sistematika Penyusunan Rencana Strategis SKPD. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut, pemerintah daerah (termasuk di dalamnya OPD di lingkungan Pemerintah Daerah) Sedangkan proses perumusan RENSTRA sendiri mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sigi dan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis yang terjadi dan diperhitungkan akan berpengaruh terhadap upaya pencapaian RENSTRA.

RENSTRA Sekretariat DPRD Kabupaten Sigi tahun 2025-2029 ini memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program serta Kegiatan-kegiatan indikator kurun waktu lima tahun mendatang yakni tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Sasaran program dan kegiatan-kegiatan indikator tersebut nantinya akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam suatu rencana kerja tahunan. RENSTRA ini merupakan langkah awal dalam rangka pengukuran kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja satuan.

RPJMD Tahun 2025-2029 menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam mengimplementasikan serangkaian program jangka menengah yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah. Dokumen RPJMD ini juga menjadi panduan untuk menyusun perencanaan perangkat daerah, dan dunia usaha maupun masyarakat dalam ikut serta bersama membangun Kabupaten Sigi. Seluruh pihak diharapkan dapat mendukung implementasi rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Sigi untuk mencapai tujuan pembangunan daerah tahun 2025-2029 yaitu “Kabupaten Sigi Maju, Berkelanjutan Berbasis Pertanian Dan Pariwisata”.

Pada akhirnya, Implementasi dari dokumen ini memerlukan komitmen bersama dari seluruh pihak baik anggota organisasi maupun pihak-pihak lain yang terkait. Upaya maksimal dari seluruh potensi sumber daya organisasi dan pihak-pihak

terkait sangat diharapkan, sehingga pada gilirannya akan terwujud Visi Sekretariat DPRD Kabupaten Sigi khususnya dalam rangka mewujudkan Kabupaten Sigi yang semakin sejahtera.

Sigi, 14 Agustus 2025

Mengetahui :

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN SIGI

